

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kasus *fraud* atau kecurangan semakin sering kita temui. *Fraud* merupakan suatu kejahatan yang terjadi diseluruh aspek kehidupan dinegara ini. *Fraud* dilakukan oleh seluruh golongan, baik dari golongan atas hingga golongan bawah. *Fraud* sendiri memiliki pengertian yaitu suatu tindakan penipuan yang disengaja dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar hukum.¹ *Fraud* juga bisa dimaknai sebagai sebuah perilaku yang disengaja berupa penipuan yang akan memberikan profit bagi sekelompok pelaku dan akan menyebabkan kerugian untuk pihak lain.² Sedangkan kecenderungan *fraud* adalah suatu ancaman yang semakin bertambah dan terjadi berkali-kali untuk melakukan penyelewengan yang berkarakteristik adanya tindakan dan kebijakan meniadakan informasi yang benar.³ Dari pernyataan-pernyataan diatas bisa diringkas jika *fraud* ialah sebuah perilaku penipuan yang disengaja yang dapat menguntungkan bagi sekelompok pelaku dan merugikan pihak lain dimana tindakan ini tidak diperbolehkan dan melanggar hukum.

Fraud bukan cuma dialami pada sektor swasta saja namun juga dialami dalam sektor pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah sebaiknya disampaikan secara benar dan sesuai dengan kenyataannya. Beracuan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan bahwa barometer penyajian informasi keuangan dalam suatu laporan keuangan pemerintah didasarkan pada efektivitas sistem pengendalian internal, ketaatan terhadap prundanga-undangan, kecukupan pengungkapan, dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).⁴

¹ Ayu Wulandari, "Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi UMMI* 1, no. 2 (2021): 72.

² Dewi Anggraini, Eri Triharyati, and Helen Anggia Novita, "Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Fraud," *Journal of Economic, Business and Accounting* 2, no. 2 (2019): 375.

³ Putri Damayanti and Anissa Hakim Purwantini, "Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, Kesesuaian Kompensasi, Dan Integritas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)," *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 2021, 392.

⁴ Nikke Yusnita Mahardini and Ade Miranti, "Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas

Dalam *fraud triangle* menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi dikarenakan beberapa keadaan yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.⁵ Tekanan merupakan motivasi dalam menjalankan *fraud* karena terdapat faktor dari dalam dan faktor dari luar.⁶ Kemudian kesempatan, hal ini dikarenakan lemahnya pengendalian internal sehingga peluang terjadinya *fraud* sangat besar karena tidak mampunya menilai kualitas kerja pegawai.⁷ Sedangkan rasionalisasi terjadi karena adanya keyakinan dari pelaku *fraud* bahwa kecurangan yang dilakukannya adalah haknya dan bukan merupakan suatu tindakan yang salah.⁸

Indonesian Forum for Corporate Governance (FCGI) memaparkan tentang konsep *good corporate governance* merupakan suatu aturan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara internal dan eksternal yang meliputi pemerintah, karyawan, kreditur, dan lainnya. Konsep *good corporate governance* merupakan suatu sistem tata kelola yang mampu mengendalikan suatu organisasi dan memberikan arahan supaya dapat meningkatkan kualitasnya.⁹ Biasanya dalam suatu instansi konsep tata kelola ini digunakan untuk tujuan pencegahan *fraud*.

Pencegahan *fraud* merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk menekan faktor penyebab *fraud* yang meliputi; mempersempit peluang terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan, mengurangi tekanan pegawai supaya dapat mencukupi kebutuhannya, dan memangkas alasan guna pembenaran atas

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015,” *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2018): 22.

⁵ Titis Widhiani, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada OPD Kabupaten Seruyan),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 9, no. 2 (2021).

⁶ Syaipul Rokhim and I Made Laut Mertha Jaya, “Determinan Terjadinya Fraud Di Lingkungan Pemerintahan,” *Gorontalo Accounting Journal* 4, no. 2 (2021): 124.

⁷ Jelfani Saragih Sumbayak, “Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan (Fraud),” *JOM Fekon* 4, no. 1 (2017): 3173.

⁸ Mia Tri Puspitaningrum, Eindye Taufiq, and Satria Yudhia Wijaya, “Pengaruh Fraud Triangle Sebagai Prediktor Kecurangan Pelaporan Keuangan,” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21, no. 1 (2019): 81.

⁹ Putu Purnama Dewi, Ni Putu Ani Suwantari, and I Putu Dharmawan Pradhana, “Faktor-Faktor Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perbankan,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 31, no. 6 (2021): 1593.

penipuan yang sudah dijalankan.¹⁰ Upaya menghambat perilaku *fraud* bisa disebabkan oleh beberapa faktor mencakup: moralitas individu, pengendalian internal dan *reward system*. Moralitas sangat penting bagi seorang individu hal ini dikarenakan dengan adanya moral atau moralitas dapat dijadikan suatu tolak ukur dalam melihat nilai sosial yang baik dan buruk. Moralitas bisa dimaknai sebagai sebuah aspek yang dibutuhkan oleh pribadi seseorang terkait dengan kehidupan sosial yang harmonis, baik, dan seimbang.¹¹ Peneliti menyimpulkan bahwa moralitas individu adalah perilaku baik dari seorang individu terhadap individu lain yang sesuai dengan hati nurani dan mutlak dimiliki oleh seorang individu.

Moralitas individu sangat penting dimiliki oleh seseorang terutama dalam upaya pencegahan *fraud*. Hal ini dikarenakan moral yang dimiliki seseorang dapat dilihat sesuai dengan kepribadian dan cara pikir yang mengutamakan kejujuran dan keadilan.¹² Dari watak dan *mind set* yang dimiliki individu kita juga dapat mengetahui bahwa orang tersebut memiliki keinginan melakukan kecurangan atau tidak. Dalam penelitian terdahulu mengenai dampak *whistleblowing system*, budaya organisasi dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali mencerminkan bahwasannya moralitas individu berpengaruh positif pada pencegahan *fraud*.¹³ Hasil tersebut tidak relevan dengan riset terdahulu mengenai pengaruh kompetensi, praktek akuntabilitas dan moralitas individu terhadap pencegahan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa yang menunjukkan

¹⁰ Rachmat Fauzi Riyanto and Zainul Arifin, "Efektivitas Whistleblowing System Dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Sektor Publik Yang Dimoderasi Oleh Pendeteksian Fraud," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 2 (2022): 108.

¹¹ Khabib Luthfi, *Masyarakat Indonesia Dan Tanggung Jawab Moralitas (Analisis, Teori, Dan Perspektif Perkembangan Moralitas Di Masyarakat)* (Guepedia, 2018).

¹² Ida Ayu Mega Evia Lestari and Putu Cita Ayu, "Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2021, 102.

¹³ Komang Candra Restalini Anandya and Desak Nyoman Werastuti, "Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 10, no. 2 (2020): 185.

bahwasannya moralitas individu berpengaruh negatif terhadap upaya penghambatan *fraud*.¹⁴

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* adalah pengendalian internal. Pengendalian internal juga sangat dibutuhkan dalam suatu instansi. Pengendalian internal ialah suatu usaha guna memberikan keyakinan terkait melalui pencapaian kepatuhan pada kebijakan, kehandalan laporan keuangan dan efisiensi operasional.¹⁵ COSO (*Comitte of Sonsorng Organization of the Treadway Commision*) yang dikutip oleh Kivaayatul Akhyar menjelaskan bahwa pengendalian internal yaitu sebuah tahap yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan anggota pada sebuah institusi yang dibentuk guna menyediakan kepercayaan terkait keandalan pelaporan *financial*, kepatuhan pada hukum dan efisiensi kegiatan.¹⁶ Pengendalian yang kurang atau bahkan tidak efektif dalam suatu instansi maka akan berakibat pada tingginya kecurangan yang akan menimbulkan kerugian pada instansi tersebut. Ketidak efektifan pengendalian dalam suatu instansi juga akan memberikan jalan bagi para pegawai untuk berperilaku menyimpang guna memperoleh keuntungan bagi diri sendiri.¹⁷

Dalam penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak (studi empiris pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Patokpicis) menyatakan bahwa pengendalian internal berdampak positif terhadap upaya penghalangan *fraud*.¹⁸ Hasil kajian tersebut tidak sesuai dengan

¹⁴ Ni Wayan Sariwati and Ni Komang Suwandi, “Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Ubud, Gianyar),” *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2021, 279.

¹⁵ Cris Kuntadi, Bhayu Adi Puspita, and Achmad Taufik, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 5 (2022): 532.

¹⁶ Kivaayatul Akhyar et al., “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Wishtleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Krisna* 13, no. 2 (2022): 203.

¹⁷ Dewi Novita Wulandari and Muhammad Nuryanto, “Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan,” *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 4, no. 2 (2018): 119.

¹⁸ Faridatu Islamiyah and Anwar Made Ati Retna Sari, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan

kajian terdahulu mengenai pengaruh pengendalian internal, komitmen organisasi dan kompensasi dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit umum daerah Kabupaten Badung Mangusada yang menyatakan bahwa pengendalian internal berdampak negatif terhadap pencegahan *fraud*.¹⁹

Faktor selanjutnya bisa berdampak pada pencegahan *fraud* adalah *reward system*. *Reward system* merupakan suatu strategi yang dapat dijadikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan semangat dan kualitas kerja.²⁰ *Reward* sebaiknya diberikan kepada pegawai sesuai dengan hak dan kewajibannya, artinya seringkali pegawai mendapatkan *reward* atau penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik, maka pegawai tersebut juga akan semakin sering mengulangi tindakan baiknya.²¹ Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *reward system* merupakan suatu pemberian dari atasan kepada bawahan atau pegawainya dengan tujuan memotivasi. *Reward* sangat penting bagi suatu perusahaan atau pun lembaga guna menunjang peningkatan kinerja pegawai, sehingga akan mengakibatkan tingginya pencegahan *fraud*.

Penelitian terdahulu mengenai beberapa faktor yang berdampak pada pencegahan *fraud* menyatakan jika *reward* berdampak positif terhadap upaya penghalangan *fraud*.²² Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *reward* dan

Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu Dan Desa Pato,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 1.

¹⁹ Made Ayu Ditha Pramesti, Ni Made Sunarsih, and Ni Putu Shinta Dewi, “Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Kompensasi Dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada,” *Jurnal Kharisma* 2, no. 2 (2020): 78.

²⁰ Muhammad Rizky Damara, “Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan,” *Economics Bosowa Journal* 6, no. 1 (2020): 180.

²¹ Sigit Purnomo, “Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bogor,” *Scientific Journal of Reflection* 4, no. 4 (2021): 712.

²² Satria Wibawa and Haryono Umar, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud,” *Jurnal Riset Perbankan Manajemen Dan Akuntansi* 6, no. 1 (2022): 17.

moralitas individu terhadap penangkalan *fraud* yang menunjukkan jika *reward* tidak berdampak terhadap pencegahan *fraud*.²³

Hasil-hasil penelitian sebelumnya masih ada inkonsistensi antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, sehingga dibutuhkan riset lebih lanjut guna diketahui hasil riset manakah yang bisa mendukung. Peneliti berupaya menelaah terkait pencegahan *fraud*, sebab riset yang berkaitan hal itu belum banyak dilakukan di Kota Kudus, untuk itu perlu dijalankan riset ini. Dan peneliti memilih melakukan penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dikarenakan dapat diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus memiliki tugas sebagai auditor yaitu melakukan pengawasan, pemerikasaan, pengujian, reviu dan pengusutan laporan keuangan. Akan tetapi, tidak dapat diketahui apakah pegawai Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus pencegahan *fraud*nya tinggi atau rendah. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat diketahui apakah di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus pencegahan *fraud* dapat diterapkan atau tidak.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik guna menjalankan riset mengenai kecenderungan *fraud* dengan judul **“pengaruh moralitas individu, pengendalian internal, dan *reward system* terhadap pencegahan *fraud*: studi pada pegawai inspektorat daerah kabupaten kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Beracuan pengenalan masalah yang telah dijabarkan serta batasn masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam riset ini, yaitu:

1. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus?
3. Apakah *reward system* individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Beracuan pada rumusan masalah sub bab sebelumnya, maka dapat diuraikan maksud yang hendak diwujudkan pada riset ini adalah:

²³ Rissa Febrianty, Pupung Purnamasari, and Mey Maemunah, “Pengaruh Reward Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud,” *Prosiding Akuntansi* 7, no. 1 (2021): 197.

1. Untuk menguji secara empiris dampak moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *reward system* terhadap pencegahan *fraud* di Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Hasil riset yang diharapkan tentunya ingin memberikan faedah untuk peneliti maupun pihak lain yang memerlukan, utamanya pada aspek pengembangan wawasan dan praktik. Berikut ialah faedah yang ingin dicapai dari kajian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis hasil riset ini diinginkan bisa menambah wawasan dan memberi sumbangsih dalam wujud pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pencegahan *fraud*. Di samping itu juga diinginkan bisa berfaedah sebagai referensi guna riset kedepannya.
- b) Memberikan bukti empiris kevalidan berbagai teori mengenai beberapa faktor yang berdampak pada pencegahan *fraud* yang dalam riset ini dihubungkan dengan moralitas individu, pengendalian internal, dan *reward system*.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk IAIN Kudus, kajian ini diinginkan bisa memperbanyak literatur serta referensi yang bisa dijadikan keterangan bagi mahasiswa yang hendak menelaah permasalahan sejenis.
- b) Untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, hasil riset ini bisa dijadikan sebagai sebuah parameter yang dikemudian hari dapat dipertahankan maupun dapat ditingkatkan lagi supaya menjadi lebih bermutu diwaktu mendatang.
- c) Untuk penulis, kajian ini sebagai implementasi beragam teori yang didapatkan selama dibangku kuliah dan diinginkan bisa manambah wawasan penulis, serta sebagai bahan potensial guna mengembangkan wacana dan persepsi untuk mengimplementasikan teori yang terdapat melalui kondisi yang riil.

E. Sistematika Penulisan

Susunan penulisan skripsi atau kajian ini ditujukan guna memperoleh gambaran dan garis besar dari tiap bagian yang saling berkaitan, alhasil didapatkan riset yang runtut dan ilmiah. Di bawah ini ialah sistematika penulisan yang hendak penulis buat adalah:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini mencakup: lembar judul, lembar nota pembimbing, lembar pengesahan, lembar motto, lembar persembahan, kata pengantar, lembar abstraksi, lembar daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Dalam bagian kedua atau isi mencakup garis besar yang terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan, sebab kelimanya merupakan satu kesatuan yang lengkap, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama termuat latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud riset, faedah kajian, dan runtutan penyusunan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini termuat *Theory Planned Behavior*, moralitas individu, pengendalian internal, *reward system*, dan pencegahan *fraud*, beberapa riset yang telah ada, kerangka pemikiran, serta dugaan sementara penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian tiga mencakup ragam dan pendekatan riset, sumber data, populasi dan sampel, identifikasi variabel, definisi variabel operasional, metode pengumpulan data, pengujian validitas dan reliabilitas, pengujian asumsi klasik, telaah data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat termuat gambaran umum objek riset, responden, telaah data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bagian kelima termuat ringkasan dan berbagai masukan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini mencakup: daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan beragam lampi